

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM : Program Pelayanan Penanaman Modal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tujuan : Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelayanan konsultasi perizinan berusaha ditujukan kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya. Namun, berdasarkan kondisi umum pelaku usaha, perempuan terutama pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan perizinan usaha berbasis elektronik. Belum seluruh data layanan konsultasi perizinan disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin sehingga belum dapat diketahui secara pasti tingkat pemanfaatan layanan oleh laki-laki dan perempuan.	Akses: - Pelaku usaha perempuan belum memperoleh akses informasi perizinan yang sama. - Pemanfaatan layanan digital perizinan masih lebih banyak digunakan oleh pelaku usaha laki-laki Partisipasi: - Keterlibatan perempuan dalam kegiatan konsultasi dan sosialisasi perizinan masih rendah Control: - Perempuan belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan usaha dan pengurusan legalitas usaha	- Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan pengguna layanan konsultasi. - Belum optimalnya strategi pelayanan yang responsif gender. - Belum dilakukan pemetaan kebutuhan pelaku usaha perempuan secara khusus.	- Rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha perempuan. - Keterbatasan waktu akibat peran domestik. - Kurangnya informasi mengenai manfaat legalitas usaha dan perizinan berusaha.	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi pelaku usaha laki-laki dan perempuan dalam memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	- Menyediakan data penerima layanan yang terpilah menurut jenis kelamin. - Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi perizinan dengan melibatkan pelaku usaha perempuan. - Memberikan pendampingan pengurusan perizinan kepada UMKM perempuan. - Mengoptimalkan media informasi yang mudah diakses oleh perempuan. - Melakukan monitoring jumlah pengguna layanan laki-laki dan perempuan	Target Pelaku usaha penerima layanan konsultasi tahun 2027 sebanyak 250 orang	Input : Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 36.000.000,00 Output: - Tersedianya data terpilah pengguna layanan konsultasi perizinan. - Terlaksananya layanan konsultasi yang responsif gender. Outcome : - Meningkatnya jumlah perempuan yang memanfaatkan layanan konsultasi perizinan. Meningkatnya legalitas usaha yang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Terintegrasi secara Elektronik	Masih terdapat kesenjangan akses dan pemanfaatan layanan konsultasi perizinan berusaha antara pelaku usaha laki-laki dan perempuan, khususnya pada usaha mikro dan kecil yang dikelola perempuan	<u>Manfaat :</u> - Manfaat kemudahan perizinan dan pengembangan usaha lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha yang memiliki akses informasi lebih baik						dimiliki pelaku usaha perempuan. - Terwujudnya kesetaraan akses layanan perizinan berusaha bagi laki-laki dan perempuan.



Pulau Punjung, 21 Juni 2026

NALDI, S.STP, M.si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198204112000121002

TIM VERIFIKASI,

 Inspektur RAHMADANI, S.H., M.H NIP. 19760830 200012 1 001	KEPALA BKD MARTEN YUNUS, S.Kom.M.Eng NIP. 19740821 200212 1 001	 Kepala Bappeda FRINALDI, S.T., M.Sc NIP. 19751205 200501 1 004	 Kepala Dinas Sosial P3 APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M.M NIP. 19820521 200012 1 002
---	---	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Sasaran Program		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Kegiatan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
	Gambaran Umum	Pelayanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pendampingan, dan informasi kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha melalui sistem elektronik (OSS-RBA). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan legalitas usaha di Kabupaten Dharmasraya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	Indikator Kinerja	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha.
	Batasan Kegiatan	Pelayanan konsultasi diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan atau akan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Dharmasraya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Maksud dan Tujuan		Maksud : Memberikan kemudahan akses informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha. 2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS-RBA.

	3. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. 4. Mendorong peningkatan investasi dan legalitas usaha.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelayanan konsultasi secara tatap muka di Mal Pelayanan Publik/DPMPTSP. 2. Pelayanan konsultasi melalui media elektronik dan telepon. 3. Pendampingan pengurusan perizinan melalui OSS-RBA. 4. Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perizinan berusaha
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	PPTK Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2027
Biaya	APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2027 Rp. 36 000 000

Pulau Pinang, 24 Juni 2026


 NALDI, S.STP, M.si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 198204112000121002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN ANGGARAN : 2027

PROGRAM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
KODE KEGIATAN	2.18.04.2.01
HASIL / OUTPUT	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 500 pelaku usaha
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pelayanan konsultasi perizinan berusaha ditujukan kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya. Namun, berdasarkan kondisi umum pelaku usaha, perempuan terutama pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan perizinan usaha berbasis elektronik. Belum seluruh data layanan konsultasi perizinan disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin sehingga belum dapat diketahui secara pasti tingkat pemanfaatan layanan oleh laki-laki dan perempuan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses: - Pelaku usaha perempuan belum memperoleh akses informasi perizinan yang sama. - Pemanfaatan layanan digital perizinan masih lebih banyak digunakan oleh pelaku usaha laki-laki. Partisipasi: Keterlibatan perempuan dalam kegiatan konsultasi dan sosialisasi perizinan masih rendah Control: Perempuan belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan usaha dan pengurusan legalitas usaha Manfaat : Manfaat kemudahan perizinan dan pengembangan usaha lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha yang memiliki akses informasi lebih baik b. Penyebab Internal - Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan pengguna layanan konsultasi. - Belum optimalnya strategi pelayanan yang responsif gender. - Belum dilakukan pemetaan kebutuhan pelaku usaha perempuan secara khusus. c. Penyebab Eksternal - Rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha perempuan. - Keterbatasan waktu akibat peran domestik. - Kurangnya informasi mengenai manfaat legalitas usaha dan perizinan berusaha..
RENCANA AKSI	1. Menyediakan data penerima layanan yang terpilah menurut jenis kelamin. 2. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi perizinan dengan melibatkan pelaku usaha perempuan. 3. Memberikan pendampingan pengurusan perizinan kepada UMKM perempuan. 4. Mengoptimalkan media informasi yang mudah diakses oleh perempuan. 5. Melakukan monitoring jumlah pengguna layanan laki-laki dan perempuan.
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur - Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha - Meningkatnya akses layanan konsultasi perizinan berusaha - Meningkatnya akses pelaku usaha laki-laki dan perempuan terhadap layanan konsultasi perizinan berusaha - Tersedianya data terpilah gender pengguna layanan perizinan

	2. Indikator dan Target Kinerja	
	<u>Input :</u> - Tersedianya anggaran untuk penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko <u>Output:</u> - Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik <u>Outcome :</u> - Meningkatnya akses dan pemanfaatan layanan konsultasi perizinan berusaha oleh pelaku usaha laki-laki dan perempuan.	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 - Menyediakan data penerima layanan yang terpilih menurut jenis kelamin. - Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi perizinan dengan melibatkan pelaku usaha perempuan. - Memberikan pendampingan pengurusan perizinan kepada UMKM perempuan. - Mengoptimalkan media informasi yang mudah diakses oleh perempuan. - Melakukan monitoring jumlah pengguna layanan laki-laki dan perempuan	
	Masukan	Rp. 36.000.000,00
	Keluaran	Pealayanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Hasil	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 500 pelaku usaha.



Pulau Punjung, 24 Juni 2026

NALDI, S.STP, M.si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198204112000121002

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur RAHMADANI, S.H., M.H NIP. 19760830 200012 1 001	KEPALA BKD MARTEN YUNUS, S.Kom, M.Eng NIP. 19750225 199501 1 001	Kepala Bapperida FRINALDI, S.T., M.Sc NIP. 19751205 200901 1 004	Kepala Dinas Sosial P3APKB MARTIN EFENDI HS, S.Hut. M.M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--